KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

RENCANA KERJA

TAHUN 2022

DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

JAKARTA, 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan disusun sebagai pedoman penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran lingkup Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Rancangan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024, Rancangan kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022.

Rencana Kerja Tahun 2022 juga merupakan kerangka kerja pengolahan dan pemasaran hasil hutan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menjaga akuntabilitas kerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, sehingga diharapkan capaian kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat diwujudkan.

Ucapan Terimakasih disampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dirktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Jakarta, Desember 2021
Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,

Ir. Istanto, M.Sc.
NIP. 19621119 199003 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v

Bab I Pendahuluan 1

A. Umum 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 1
C. Struktur Organisasi 2

Bab II Capaian Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022 4

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2020 dan Tahun 2021 4
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 dan Serapan Anggaran Tahun 2021 5

Bab III Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 7

A. Strategi dalam mendukung program KLHK dan Program Prioritas Nasional 7
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2022. 7

Bab IV Penutup 14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2020 1

Tabel 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 4

Tabel 3. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 5

Tabel 4. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 5

Tabel 5. Kegiatan Mendukung Program Prioritas Nasional 7

Tabel 6. Indikator Kinerja dan Unit Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan 8

Tabel 7. Unit Kegiatan untuk Output NSPK Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan 9

Tabel 8. Unit Kegiatan untuk Output Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan 10

Tabel 9. Unit Kegiatan untuk Output Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan . 11

Tabel 10. Unit Kegiatan untuk Output Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu 12

Tabel 11. Unit Kegiatan untuk Output Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar 12

Tabel 12. Unit Kegiatan untuk Output Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan 13

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dahulu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) diberi amanah untuk melaksanakan "Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan". Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan tata kelola hutan produksi dalam rangka meningkatkan daya saing industri kehutanan.

Adapun sasaran program yang akan dicapai sesuai dengan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari;
2. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil hutan serta penerimaan negara bukan pajak dari hutan produksi;
3. Meningkatnya produksi dan ragam produk hasil hutan (kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan); dan
4. Meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan.

Sebagai parameter keberhasilan dalam pencapaian sasaran, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dahulu Direktorat Jenderal Pengeloaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Tahun 2020-2024, adalah :

1. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang menanam meningkat setiap tahun, meningkat menjadi 439 Unit selama 5 tahun;
2. Unit Usaha yang melakukan diversifikasi hasil hutan meningkat menjadi 7 Unit selama 5 tahun;
3. Produksi hasil hutan meningkat menjadi 60 juta m^3 selama 5 Tahun;
4. Ekspor produk industri kehutanan meningkat sebesar US$10,5 miliar pada tahun 2024;
5. Iuran kehutanan dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar Rp3,645 triliun pada tahun 2024;
6. Tata kelola hutan di tingkat tapak meningkat menjadi 150 Unit KPHP selama 5 tahun; dan
7. Akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi meningkat seluas 65.000 ha selama 5 tahun.

Berangkat dari sasaran program dan IKP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) tersebut diatas, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dahulu Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024, yang ditetapkan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dengan mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan disusun untuk mendukung tercapaianya sasaran program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan yaitu Peningkatan Usaha Industri Kehutanan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Industri Kehutanan Tahun 2020-2024 dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan peningkatan usaha industri kehutanan tahun 2020-2024.

No	IKK	Satuan	Target Kinerja Kegiatan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah penerbitan izin usaha atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu	Izin	30	60	90	120	150	Target hingga 2024 sebanyak 150 IPHH berbasis kayu
2.	Jumlah penerbitan izin usaha industri HHBK	Izin	6	12	19	26	33	Target hingga 2024 sebanyak 33 IPHH berbasis HHBK
3.	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	Juta M3	45	90	135	180	225	Target hingga 2024 sebanyak 225 juta M3
4.	UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK	UMKM	160	360	510	610	710	Target hingga 2024 sebanyak 710 UMKM
5.	Volume ekspor produk industry kehutanan	Juta Ton	15	30,5	46,5	63	80	Target hingga 2024 sebanyak 80 Juta Ton
6.	Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	Dokumen	1	2	3	4	5	Target hingga 2024 sebanyak 5 Dokumen

Untuk memberikan kemudahan, petunjuk atau pedoman serta arahan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil hutan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan yang menjabarkan kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tetap memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada Renstra.

Berdasarkan RKP dan Pagu Anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatandan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenisbelanja, dan kelompok belanja.

Dalam rangka mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan juga telah melaksanakan penandatangan kontrak kinerja/perjanjian kinerja. Penetapan perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada tahun 2021, sehubungan dengan adanya perubahan/revisi pagu anggaran terkait relokasi untuk penanganan pandemic Covid-19 dan potensi kendala pelaksanaan kegiatan akibat adanya pandemic Covid-19, dilakukan perubahan target kinerja sehingga target kinerja tahun 2021 menjadi lebih kecil dari yang ditetapkan pada Renstra, sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2 Perjanjian kinerja tahun 2021

No	Uraian	Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2021	
		Target	Pagu Anggaran
1.	Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan dan HHBK	36 izin	Kegiatan: Peningkatan Usaha Industri Kehutanan Rp18.197.340.000,00
2.	UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK	200 unit UMKM	
3.	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	45 juta m^3	
4.	Ekspor produk industri kehutanan	15,5 juta ton	
5.	Peraturan perundangan terkait pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	1 dokumen	

Pada tahun 2021, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menjadikan kontrak kinerja sebagai dokumen penetapan kinerja. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi, serta tugas dan fungsi utama unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan merupakan Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan. Dan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan memiliki fungsi:

1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;
3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;
4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;
5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan; dan
6) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas :

a. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
b. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan;
c. Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan;
d. Sub bagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat dilihat dalam gambar berikut :

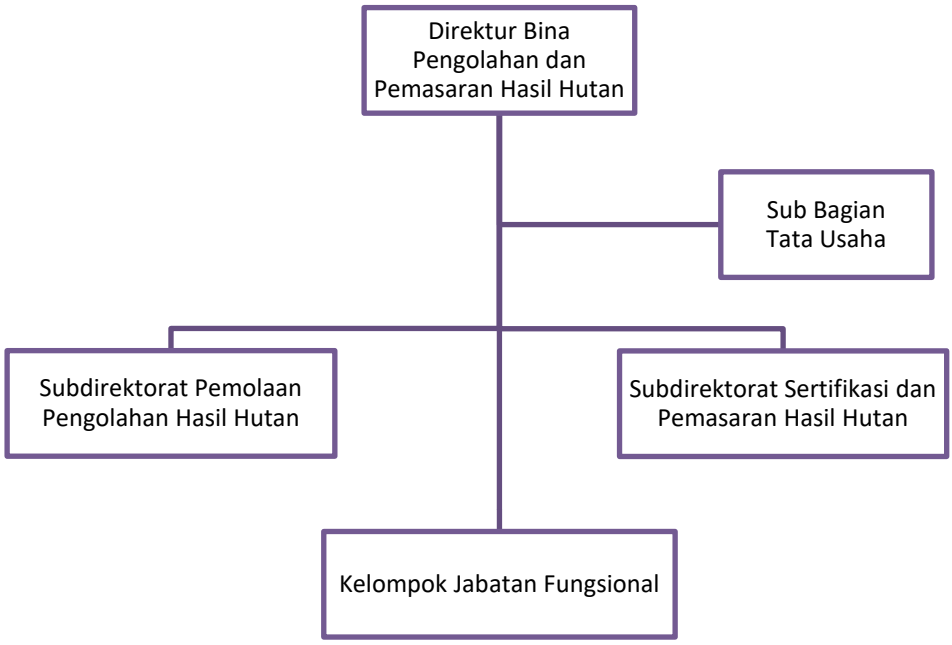

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat BPPHH

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut serta mendukung pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari khususnya dalam peningkatan nilai ekspor hasil hutan, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2022 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan agar sasaran Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2022 dapat tercapai secara optimal, efektif, dan efisien.

BAB II
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2020 dan Tahun 2021

Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan dokumen ke-3 pelaksanaan Rencana Jangka Menengah (RPJM) periode 2020-2024. Pada Tahun 2020 dan 2021, semua target kinerja pada IKK Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat tercapai dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	IKK	Satuan	Pengukuran Kinerja 2020			Pengukuran Kinerja 2021		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Penerbitan izin usaha atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan	Izin	36	39	120	36	39	108,33
3.	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	Juta M3	45	41,34	120	45	47,91	106,46
4.	UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK	UMKM	160	39	120	200	300	150,00
5.	Volume ekspor produk industry kehutanan	Juta Ton	15	16,72	120	15,5	17,03	109,87
6.	Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	Dokumen	1	1	100	1	1	100,00

Untuk tahun 2020 dan 2021, semua IKK yang ditargetkan dapat tercapai sesuai dengan rencana, meskipun pada awal pelaksanaanya dipertimbangkan untuk dilakukan revisi/penyesuaian terhadap target akibat adanya pemotongan anggaran dan pandemic covid-19 yang diperkirakan akan mengahambat proses pencapaian target, namun demikian hingga akhir Tahun Anggaran, semua target output dapat tercapai.

Untuk IKK Tahun Anggaran 2022, dilakukan penyesuaian sebagai tindak lanjut atas perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja 2022, sehingga IKK Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menjadi :

1. Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu dengan target sebesar 225 juta m^3 pada tahun 2024;
2. UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK sebanyak 710 UMKM pada tahun 2024; dan

3. Volume ekspor produk industry kehutanan sebesar 80 juta ton pada tahun 2024.

Untuk mencapai IKK komulatif pada tahun 2024, Tahun Anggaran 2022, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan memiliki target capaian IKK sebagai berikut :

1. Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu dengan target sebesar 45 juta m^3;
2. UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK sebanyak 150 UMKM; dan
3. Volume ekspor produk industry kehutanan sebesar 15 juta ton.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021

Pagu Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020 (pagu akhir setelah revisi) adalah sebesar Rp. 4.022.481.000,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 3.987.904.055 atau 99,14 % dari PAGU.

Tabel 3. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020

Kode Output	Uraian	Pagu	Realisasi	Ket
5401.001	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Yang Diterbitkan	933.248.000	914.794.506	98,02 %
5401.002	Verifikasi Terhadap Sertifikat Legalitas Kayu Yang Diterbitkan	1.461.252.000	1.458.111.495	99,79 %
5401.003	Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan	1.469.321.000	1.468.428.704	99,94 %
5401.004	Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan	158.660.000	146.569.350	92,38 %
Jumlah Peningkatan Usaha Industri Kehutanan		4.022.481.000	3.987.904.055	99,14 %

Pada tahun 2021, PAGU awal Anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan sebesar Rp 18.197.340.000,00 dan selanjutnya dilakukan revisi refocusing anggaran sehingga PAGU pada revisi terakhir pada 2 Agustus 2021 berkurang menjadi sebesar Rp. Rp 12.244.866.000,00. Serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 12.165.370.953,00 atau 99,35 % dari PAGU hasil revisi terakhir.

Dengan capaian kinerja sebesar 108,94%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,91 (dari perhitungan rasio input dibagi output = 99,35 : 108,94 = 0,91). Dengan demikian, capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2021 termasuk kategori efisien (nilai efisiensi <1).

Tabel 4. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021

Kode Output	Uraian	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
5401.AFA.001	NSPK Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	352.200.000	299.097.000	297.663.157	99,52
5401.BAC.001	Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	1.600.000.000	1.289.720.000	1.284.310.403	99,58
5401.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	12.499.900.000	7.925.555.000	7.886.716.060	99,51
5401.PBV.001	Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	500.000.000	250.990.000	246.707.000	98,29
5401.QAH.001	Layanan Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 6.000 m3/tahun ke atas	900.000.000	646.640.000	644.711.930	99,70
5401.QDB.001	Pembinaan Teknis/Supervisi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	2.345.240.000	1.832.864.000	1.805.262.403	98,29
	Jumlah	18.197.340.000	12.244.866.000	12.165.370.953	99,35

BAB III
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

A. Strategi dalam mendukung program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) memilik peran penting untuk mendukung 1 (satu) Kegiatan Prioritas Nasional pada Tahun 2022, yaitu Prioritas Nasional (PN) Nomor 1 "Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan". Ditjen PHL membantu memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi global yang berjalan lambat akibat Pandemi Covid-19, melalui penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor dan penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan pemasaran, perluasan investasi dan efisiensi distribusi dan perdagangan sektor kehutanan.

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, untuk mendukung proritas nasional tahun 2022 adalah optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pasar, fasilitasi UMKM kehutanan, peningkatan pelayanan perizinan pengolahan hasil hutan, dan pembinaan industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Tabel 5. Kegiatan Mendukung Program Prioritas Nasional

PN	PP	KP	Pro PN	Kegiatan	Output	Pagu (Rp) x 1.000
01-Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Sektor Riil dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Berbabis Pertanian, Kemaritiman dan Non Agro yang Terintgrasi huku-hilir	04-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	5401-Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	Layanan Perizinan PBPHH Skala Usaha Besar	790.000
					Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	2.279.764
					Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	500.000
					Perizinan Pegolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya	7.818.989
					Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	25.386.327

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2022

Dalam mendukung program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan. Kegiatan ini untuk mendukung pancapaian sasaran program "meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu". Pada Tahun 2022, Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan memperoleh alokasi PAGU Anggaran sebesar Rp. 52.324.842.000,-. Penilaian keberhasilan kegiatan ini diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan, dengan unit kegiatan dan alokasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6. Indikator Kinerja dan Unit Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output / Satker	Anggaran (Rp) X 1.000
Penerbitan Izin atau Perluasan Izin Usaha Industri Primer hasil hutan kayu dan HHBK (SK)	Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar (Pusat)	790.000
	NSPK Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (Pusat)	299.762
Volume Produksi Kayu Olahan Yang Bersertifikat Legalitas Kayu (m3)	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (Pusat)	2.279.764
	Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah (BPHP)	6.750.000
	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya (BPHP)	10.918.989
Ekspor produk Industri Hasil Hutan Kayu (Juta Ton)	Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan (Pusat)	5.400.000
UMKM Yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Unit UMKM)	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (Pusat dan BPHP)	25.386.327
Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu (dokumen)	Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu (Pusat)	500.000

Dalam rangka mewujudkan tercapainya IKK tersebut, ditetapkan Output kegiatan yang telah disesuaikan dengan arsitektur dan informasi kinerja dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2021. Rincian Output dan unit kegiatan tersebut adalah sebagaimana penjelasan berikut :

1. Output NSPK Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Alokasi PAGU : Rp. 299.762.000,
Target Ouput : 1 Rancangan NSPK

Unit kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pembuatan NSPK bidang industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan konsultasi public dengan tujuan tersedianya NSPK bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan yang selaras dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan mempunyai pedoman yang jelas dan dapat berjalan lancer.

Adapun rincian unit kegiatan, indikator unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Unit Kegiatan untuk Output NSPK Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Pembahasan dan Penyusuan NSPK	Tersusunnya rancangan NSPK Bidang Industri PPHH	- Rancangan NSPK	- Pembahasan Rancangan NSPK - Penyusunan NSPK
Konsultasi Publik	Terlaksanannya Konsultasi Publik Rancangan NSPK Industri PPHH	- Laporan Konsultasi Publik Rancangan NSPK	- Konsulotasi Publik Rancangan NSPK

2. Ouput Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan

Alokasi PAGU : Rp. 5.400.000.000
Target Output : 250 Badan Usaha

Unit kegiatan ini dimaksudkan untuk peningkatan volume ekspor produk industri kehutanan melalui pelayanan penerbitan dokumen v-legal, pembinaan kegiatan ekspor dan impor serta pemantauan data ekspor dan impor produk industri kehutanan.

Adapun rincian unit kegiatan, indikator unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Unit Kegiatan untuk Output Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Pengelolaan Sistem Informasi Legalitas Kayu	Terkelolanya 1 (satu) unit Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) untuk pelayanan dokumen ekspor serta sebagai pusat informasi legalitas kayu	Sistem Informasi Legalitas Kayu (http://silk.menlhk.go.id) beroperasi lancar	- Pemeliharaan Aplikasi SILK - Fasilitasi dan pemantauan data ekspor dan rencana impor

3. Output Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan

Alokasi PAGU : Rp. 25.386.327.000
Target Output : 150 UMKM (50 UMKM Pusat dan 100 UMKM BPHP)

Unit kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung implementasi pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dalam memberikan jaminan legalitas kayu yang diperdagangkan di Indonesia serta untuk memfasilitasi sertifikasi legalitas kayu bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Adapun rincian unit kegiatan, indikator unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagaimana pada Tabel 9.

Tabel 9. Unit Kegiatan untuk Output Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Fasilitasi Sertifikasi/ Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM	Tersedianya data UMKM yang akan difasilitasi Sertifikasi SVLK	- Data UMKM difasilitasi sertifikasi	- Inventarisasi kelompok UMKM yang akan difasilitasi sertifikasi maupun penilikan pertama
Fasilitasi Sertifikasi/ Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM	Terlaksananya kegiatan sertifikasi legalitas kayu (Sertifikasi Pertama pada kelompok UMKM	- Data kelompok UMKM yang difasilitasi SLK dan dilakukan penilikan - Dokumen Kontrak dengan LVLK	- Penilaian dan penilikan kelompok UMKM oleh LVLK
Fasilitasi Pelatihan Auditor/Asesor/ Pendamping SVLK Bagi Eksportir Industri Kecil / UMKM	terlaksananya peningkatan kapasitas pada SDM Pendamping serta LVLK dalam mendukung implementasi SVLK	- Pelaksanaan peningkatan kapasitas LVLK - Pelaksanaan pembekalan bagi pendamping	- Pelatihan dan pembekalan tenaga pendamping dan SDM LVLK
Bimbingan Teknis/Pembinaan UMKM ber-SVLK	Terlaksananya bimbingan teknis kepada kelompok UMKM yang difasilitasi sertifikasi legalitas kayu	- Kesiapan kelompok UMKM dalam pelaksanaan penilaian sertifikasi legalitas kayu oleh LVLK	- Pendampingan ke kelompok UMKM yang difasilitasi sertifikasi legalitas kayu
Supervisi Impelementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian	Terlaksananya Supervisi Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian	- Data Evaluasi implementasi SVLK	- Evaluasi implementasi SVLK - Supervisi Implementasi SVLK
Sosialisasi Peraturan SVLK/Pemberdayaan UMKM/Desain Pemasaran/Temu Bisnis	terlaksananya Sosialisasi Peraturan SVLK/Pemberdayaan UMKM/Desain Pemasaran/Temu	- Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan SVLK - Desain Pemasaran UMKM - Temu Bisnis UMKM	- Sosiliasasi Peraturan SVLK - FGD Desain Pemasaran UMKM - Forum Temu Bisnis UMKM

	Bisnis implementasi SVLK		
Fasilitasi Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM oleh BPHP	Terlaksananya Fasilitasi Penilikan SVLK dan Identifikasi UMKM oleh BPHP	- Data UMKM yang difasilitasi Penilikan SLK dan Data hasil inventarisasi rencana fasilitasi UMKM tahun berikutnya	- Bombngan Teknis UMKM - Fasilitasi Penilikan SLK untuk UMKM - Identifikasi UMKM calon penerima fasilitasi SLK tahun berikutnya

4. Output Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu

Alokasi PAGU : Rp. 500.000.000
Target Output : 1 Dokumen

Unit kegiatan ini dimaksudkan untuk megkaji pelaksanaan pemasaran produk industri kehutanan dalam upaya peningkatan ekspor produk industri kehutanan melalui evaluasi kondisi pemasaran hasil hutan, evaluasi hambatan pemasaran dan memberikan rekomendasi perbaikan tatakelola pemasaran produk industri kehutanan..
Adapun rincian unit kegiatan, indikator unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Unit Kegiatan untuk Output Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	Tersedianya rekomendasi untuk pengembangan pasar peoduk industri kehutanan atau perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	- Data/Informasi kegiatan pemasaran hasil hutan - Data Evaluasi Kebijakan Pemasaran Hasil Hutan - Laporan kegiatan	- Koordinasi dan Pengumpulan Data - Evaluasi Kebijakan dan Penyusunan Kajian - Konsultasi Publik

5. Output Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar

Alokasi PAGU : Rp. 790.000.000,
Target Output : 37 Unit

Unit kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kelancaran pelayanan izin usaha industri primer hasil hutan, khususnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, serta fasilitasi untuk kordinasi/supervisi pelaksanaan layanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan pelayanan perizinan baik yang di pusat maupun yang di daerah

dapat terpantau dengan baik dan diperoleh gambaran perkembangan industri primer hasil hutan tingkat nasional.
Adapun rincian unit kegiatan, indikator unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Unit Kegiatan untuk Output Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Penelaahan/Verifikasi Permohonan Perizinan Usaha Industri Primer Hasil Hutan	Terlayaninya permohohan IUIPHHK kapasitas 6.000 m3 per tahun	- Permohonan IUIPHHK yang diproses - Nilai Investasi Industri Kehutanan	- Verifikasi Dokumen Perizinan - Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Pasca Perizinan
Koordinasi Pelayanan Perizinan Usaha Industri Primer Hasil Hutan	Terpantaunya Pelayanan Perizinan Industri Pengolahan HH Pusat dan Daerah	- Data dan Informasi Pelayanan Perizinan Industri Pengolahan Hasil Hutan	- Koordinasi Pelayanan Periszinan

6. Output Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Alokasi PAGU : Rp. 2.279.764.000,
Target Output : 150 Badan Usaha

Unit kegiatan ini dimaksudkan agar kegiatan industri pengolahan dan pemasarn hasil hutan berjalan sesuai ketentuan melalui pembinaan/supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada lembaga/pelaku usaha yang terkait dengan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hutan, yaitu pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu, pelaku ekspor / impor produk industri kehutanan serta lembaga sertivikasi legalitas kayu yang berperan sebagai lembaga sertifikasi dan sebagai penerbit dokumen v-legal.
Adapun rincian unit kegiatan, indikator unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Unit Kegiatan untuk Output Pembinaan Teknis/Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Pembinaan Teknis/ Supervisi bagi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	Terlaksananya pembinaan kepada Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	- Data dan Informasi Pemenuhan Bahan Baku dan Produksi Industri Primer HH - Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PBPHH	- Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri primer Hasil Hutan - Evaluasi Kinerja PBPHH

Pembinaan Teknis/ Supervisi bagi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	Terlaksananya bimbingan teknis kepada Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu	- Kesiapan kelompok UMKM dalam pelaksanaan penilaian sertifikasi legalitas kayu oleh LVLK	- Bimbingan Teknis kepada LVLK sebagai Lembaga Sertitikasi - Bimbingan Teknis LVLK sebagai Penerbit Dokumen V-Legal - Evaluasi Penerbitan Dokumen V-Legal
Pembinaan Teknis / Supervisi kepada Pelaku Ekspor/Impor Produk Industri Kehutanan	Terlaksananya Pembinaan Teknis kepada Pelaku Ekspor / Impor Produk Industri Kehutanan	- Laporan Kegiatan Pembinaan Ekspor/Impor Produk Kehutanan	- Workshop Promosi Produk Industri Kehutanan

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja ini merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi unit-unit kerja (Bagian) di lingkungan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Setiap Subdirektorat agar segera menyusun langkah-langkah persiapan pelaksanaannya agar Rencana Kerja yang sudah ditetapkan dapat diwujudkan secara optimal melalui perencanaan penganggaran dan perencanaan pengendalian kinerjanya.

Keberhasilan implementasi Rencana Kerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sangat bergantung pada kesungguhan jajaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan serta peran aktif aparatnya dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya hasil pelaksanaan kegiatan diharapkan mampu mendukung pembangunan bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang optimal dapat dirasakan oleh semua pihak.

Lampiran 1 Rancangan Output dan Komponen Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2022

Kegiatan/Output/Sub Ouput/Komponen/Sub Komponen		Volume	Satuan	RM	PNP	Jumlah
5401	**Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan**			**30.718.473**	**21.606.369**	**52.324.842**
AFA	**001-NSPK Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan**	**1**	**NSPK**	**110.835**	**188.927**	**299.762**
051	Pembahasan dan Penyusunan NSPK			25.000	140.000	165.000
052	Konsultasi Publik NSPK			85.835	48.927	134.762
BAC	**001-Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan**	**250**	**Badan Usaha**	**4.130.398**	**1.269.602**	**5.400.000**
051	Pengelolaan Sistem Informasi Legalitas Kayu			4.130.398	1.269.602	5.400.000
BDG	**001-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan**	**150**	**UMKM**	**13.887.841**	**11.498.486**	**25.386.327**
051	Fasilitasi Sertifikasi/ Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM			4.327.000	3.581.977	7.908.977
052	Fasilitasi Pelatihan Auditor/Asesor/Pendamping SVLK Bagi Eksportir Industri Kecil / UMKM			394.860	326.880	721.740
053	Bimbingan Teknis/Pembinaan UMKM ber-SVLK			363.335	300.775	664.110
054	Supervisi Impelementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian			283.507	234.693	518.200
055	Sosialisasi Peraturan SVLK/Pemberdayaan UMKM/Desain Pemasaran/Temu Bisnis			283.617	234.783	518.400
056	Fasilitasi Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM oleh BPHP			8.235.522	6.819.378	15.054.900
PBV	**001-Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu**	**1**	**Dokumen**	**200.000**	**300.000**	**500.000**
051	Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu			200.000	300.000	500.000

QAH	**001- Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar**	**37**	**Layanan**	**557.603**	**232.397**	**790.000**
	051 Penelaahan/Verifikasi Permohonan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar			328.000	170.000	498.000
	052 Koordinasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan hasil hutan Skala Besar			229.603	62.397	292.000
QDH	**001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan**	**150**	**Badan Usaha**	1.519.251	760.513	2.279.764
	051 Pembinaan Teknis/ Supervisi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan			1.091.345	473.082	1.564.427
	052 Pembinaan Teknis/ Supervisi bagi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu			157.494	200.000	357.494
	053 Pembinaan Teknis/ Supervisi bagi Pelaku Ekspor/ Impor Produk Industri Kehutanan			270.412	87.431	357.843
	002-Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah	**150**	**Badan Usaha**	3.940.321	2.809.679	6.750.000
	051 Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah			1.091.345	473.082	1.564.427
	052 Koordinasi Perizinan Berusaha Pengolahan hasil hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah			1.000.000	800.000	1.800.000
BIH	**001- Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya**	**150**	**Badan Usaha**	**6.266.122**	**4.652.867**	**10.918.989**
	051 Pemantauan harga pasar produk hasil hutan/ Kinerja Usaha/ Perizinan Berusaha Pengolahan hasil hutan Bersertifikat			6.266.122	4.652.867	10.918.989